INDEF / Institute for Development of Economics and Finance

HASIL SURVEI INDEF:
PANDANGAN & KETERLIBATAN UMKM PADA PROGRAM MBG DAN KDMP

Dzulfian Syafrian
Head Researcher

Fadhila Maulida
Researcher

Chairini Nugraharti
Researcher

M. Erick Farabi
Research Assistant

Edisi Khusus: 2 Tahun Prabowo-Gibran

Institute for Development of Economics and Finance

R A N G K U M A N E K S E K U T I F

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan dua program strategis pemerintah yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui perluasan pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keterlibatan UMKM, mengidentifikasi manfaat dan peluang ekonomi kedua program tersebut, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 1.800 pelaku UMKM formal dan informal di berbagai wilayah Indonesia pada Agustus 2026, dengan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan:

- adanya kesenjangan antara jangkauan program dan keterlibatan UMKM. Meskipun 97 persen responden mengenal MBG dan program tersebut telah hadir di 92 persen desa/kelurahan responden, hanya 5 persen UMKM formal dan 1 persen UMKM informal yang bermitra atau menjajaki kemitraan. Partisipasi dalam KDMP bahkan lebih rendah lagi.
- Sekitar 80 persen UMKM belum melihat peluang usaha baru yang tercipta dari kedua program tersebut. Mengindikasikan rendahnya efek pengganda (*multiplier effect*) dari program ini.
- Sementara itu, 22 persen responden melaporkan penurunan kegiatan usaha akibat MBG, sedangkan hanya 5 persen yang mengalami peningkatan. Dampak negatif khususnya sangat dirasakan oleh UMKM informal. Temuan ini mengindikasikan terjadinya substitusi permintaan dan terkonsentrasinya manfaat ekonomi pada pelaku tertentu, serta minimnya efek tetesan (*trickle-down effect*) dari kedua program ini.

Penelitian menyimpulkan bahwa besarnya belanja pemerintah yang berjumlah ratusan triliun tidak secara otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan dirasakan oleh pelaku UMKM. Efektivitas program bergantung pada kemampuan mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok sekaligus meminimumkan dampak persaingan terhadap usaha yang telah beroperasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengadaan UMKM lokal yang lebih luas dan inklusif, penyederhanaan prosedur dan skala pengadaan, kepastian pembayaran pemasok, pengembangan pembiayaan berbasis kontrak, serta penguatan KDMP sebagai agregator produksi dan distribusi lokal. Jika rekomendasi ini dilakukan, dampak ekonomi MBG dan KDMP dapat tersebar secara lebih luas dan merata.

Kata kunci: MBG, KDMP, UMKM, ekonomi inklusif.

DAFTAR ISI

R A N G K U M A N E K S E K U T I F 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR GAMBAR 4

DAFTAR TABEL 4

1. LATAR BELAKANG PENELITIAN 5

2. PROFIL RESPONDEN UMKM 7

3. T E M U A N D A N A N A L I S I S 9

Temuan 1: Pengetahuan UMKM terhadap MBG dan KDMP 9

Temuan 2: Corong partisipasi masih terbatas 10

Temuan 3: Gap antara Ekspektasi dan Realita 13

Temuan 4: Dukungan yang dibutuhkan UMKM 15

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 17

5. USULAN PENELITIAN BERIKUTNYA 19

6. DAFTAR PUSTAKA 19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah UMKM di Indonesia tahun 2020-2025 5

Gambar 1.2 Klasifikasi UMKM Indonesia tahun 2025 5

Gambar 2.1 Komposisi sektor responden 8

Gambar 3.1 Pengetahuan UMKM terhadap kedua program (Kiri) dan Keberadaan kedua program berdasarkan lokasi desa/kelurahan responden (Kanan) 9

Gambar 3.2 Pandangan responden terkait kedua program dapat membuka peluang baru bagi usaha 10

Gambar 3.3 Pandangan responden terkait kedua program dianggap pesaing bagi usaha 11

Gambar 3.4 Pandangan responden terkait ekspektasi mendapat manfaat dari kedua program (12 bulan ke depan).....14

Gambar 3.5 Pandangan responden terkait bagaimana keterlibatan dalam kedua program berdampak bagi usaha 15

Gambar 3.6 Dukungan yang dibutuhkan UMKM untuk masuk ke ekosistem MBG/KDMP.....16

Gambar 3.7 Pandangan responden terkait ekspektasi manfaat dan dampak dari kedua program 17

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Distribusi sampel responden berdasarkan wilayah 8

Tabel 4.1 Rekomendasi kebijakan 18

1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pemerintah Prabowo-Gibran memperkenalkan dua program strategis nasional baru, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kedua program ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, memperkuat ekonomi desa dengan menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kedua program tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat kecil melalui perluasan permintaan barang dan jasa, penguatan rantai pasok, serta penciptaan kesempatan usaha bagi para pelaku UMKM. Dengan demikian, keberhasilan implementasi MBG dan KDMP perlu dinilai berdasarkan sejauh mana keduanya mampu mendorong keterlibatan dan pemberdayaan UMKM dalam ekosistem keduanya. Keterlibatan ini krusial mengingat pentinganya UMKM bagi perekonomian nasional yang jumlahnya diklaim hingga lebih dari 56 juta (Gambar 1.1).

Gambar 1.1 Jumlah UMKM di Indonesia tahun 2020-2025

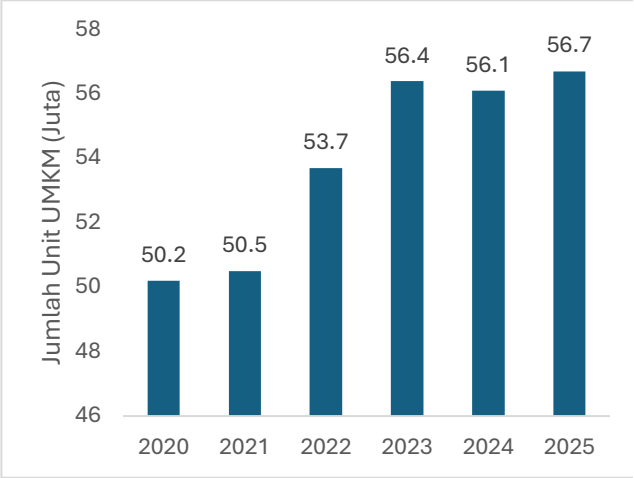

Gambar 1.2 Klasifikasi UMKM Indonesia tahun 2025

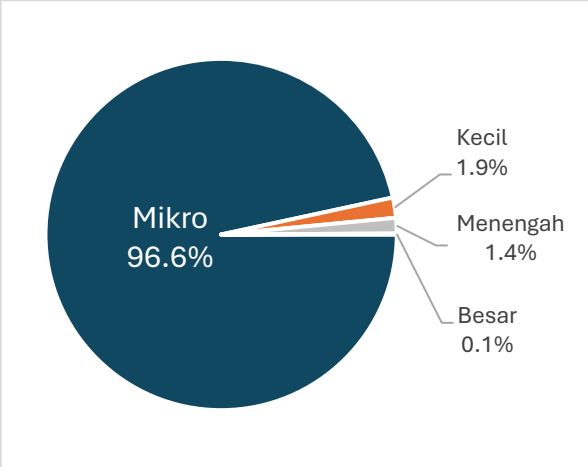

Sumber: Kementerian UMKM (2026a & 2026b)

Implementasi kedua program tersebut telah menunjukkan perkembangan yang cukup luas. Hingga Oktober 2026, sebanyak 27.022 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan telah beroperasi untuk mendukung penyelenggaraan MBG, dengan cakupan

mencapai 340 ribu satuan pendidikan, dari total 580 ribu, di Indonesia per September 2026 (CNN Indonesia, 2026). Sementara itu, pembangunan KDMP juga terus berlangsung, dengan 38.746 titik pembangunan dari 66.285 titik lahan yang telah dipetakan secara nasional hingga 17 Oktober 2026 (Kementerian Koperasi, 2026). Perkembangan ini menunjukkan bahwa kedua program telah memasuki tahap implementasi yang semakin luas.

Seiring dengan perluasan tersebut, muncul kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana aktivitas ekonomi yang dihasilkan telah memberikan peluang nyata bagi UMKM, khususnya melalui keterlibatan sebagai pemasok, mitra usaha, maupun penerima manfaat tidak langsung dari peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Namun demikian, perluasan skala implementasi program belum tentu secara otomatis menghasilkan peningkatan partisipasi dan manfaat ekonomi yang merata bagi UMKM. Perbedaan karakteristik usaha, terutama antara UMKM formal dan informal, berpotensi memengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses peluang yang diciptakan oleh MBG dan KDMP.

UMKM formal umumnya memiliki kesiapan administratif dan kelembagaan yang lebih baik dibandingkan UMKM informal yang dihadapi berbagai keterbatasan, seperti legalitas usaha, kapasitas produksi, akses pembiayaan, serta kemampuan memenuhi persyaratan kemitraan. Selain itu, tingkat pengetahuan terkait kedua program dan kesiapan pelaku usaha untuk berpartisipasi juga dapat menentukan tingkat keterlibatan mereka. Oleh karena itu, optimalisasi kedua program tersebut perlu mempertimbangkan heterogenitas UMKM agar manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok usaha besar, tetap juga di level kecil dan mikro yang merupakan mayoritas pelaku usaha di republik ini.

Dalam konteks tersebut, penelitian berbasis perspektif pelaku UMKM menjadi penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara peluang yang ditawarkan program pemerintah dan kemampuan UMKM untuk memanfaatkannya. Evaluasi yang hanya berfokus pada jumlah fasilitas, cakupan penerima manfaat, atau perkembangan pembangunan fisik belum cukup untuk menggambarkan dampak ekonomi program terhadap sektor usaha. Diperlukan pemahaman

yang lebih mendalam mengenai tingkat pengetahuan dan keterlibatan UMKM, persepsi terhadap peluang ekonomi yang tersedia, manfaat yang telah dirasakan, serta hambatan yang menyebabkan sebagian pelaku usaha belum dapat berpartisipasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, INDEF melaksanakan Survei UMKM pada Agustus 2026 dengan tujuan utama mengevaluasi persepsi, kesiapan, dan keterlibatan UMKM dalam implementasi program MBG dan KDMP. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan pelaku usaha terhadap kedua program, memetakan bentuk dan tingkat partisipasi UMKM, mengkaji persepsi mengenai manfaat dan peluang ekonomi yang ditawarkan, serta mengidentifikasi hambatan yang membatasi keterlibatan mereka.

Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan menyempurnakan desain implementasi MBG dan KDMP, terutama untuk memperluas partisipasi UMKM, meningkatkan keterhubungan dengan rantai pasok, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi kedua program dapat dirasakan secara lebih luas dan merata.

2. PROFIL RESPONDEN UMKM

Survei dilaksanakan oleh INDEF pada Agustus 2026. Kuesioner mencakup profil responden dan usaha serta persepsi terhadap program MBG dan KDMP. Responden utama adalah pemilik usaha, jika tidak memungkinkan lalu dilakukan ke manajer/stafnya. Pada UMKM informal, 84 persen wawancara dilakukan langsung dengan pemilik, pada UMKM formal proporsinya 55 persen, sedangkan sisanya diwakili manajer (13 persen) dan staf (32 persen). Status formal ditentukan berdasarkan legalitas usaha. UMKM dikategorikan formal apabila memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau berbadan hukum formal (PT, CV, atau koperasi). UMKM yang menyatakan tidak memiliki pendaftaran formal apa pun dikategorikan informal. Sampel terkonsentrasi di Jawa (Tabel 2.1), mengikuti proporsionalitas jumlah populasi UMKM secara nasional.

Tabel 2.1 Distribusi sampel responden berdasarkan wilayah

Wilayah	Total	Formal (n)	Formal (%)	Informal (n)	Informal (%)
Jawa	1144	653	69,2	491	56,9
Sumatera	322	130	13,8	192	22,2
Sulawesi	115	69	7,3	46	5,3
Kalimantan	102	61	6,5	41	4,8
Bali & Nusa Tenggara	117	28	3,0	89	10,3
Maluku	6	2	0,2	4	0,5
Total	**1806**	**943**	**100,0**	**863**	**100,0**

Sumber: INDEF (2026)

Dari sisi sektor (Gambar 2.1), perdagangan besar dan eceran merupakan sektor terbesar pada kedua segmen, diikuti akomodasi dan penyediaan makanan-minuman. Kedua sektor ini dimana menjadi klasifikasi utama MBG dan KDMP dan juga ekosistem utamanya. UMKM formal memiliki porsi industri pengolahan yang lebih besar (19 persen berbanding 13 persen), sedangkan UMKM informal lebih banyak bergerak di usaha makanan dan minuman (30 persen berbanding 22 persen).

Gambar 2.1 Komposisi sektor responden

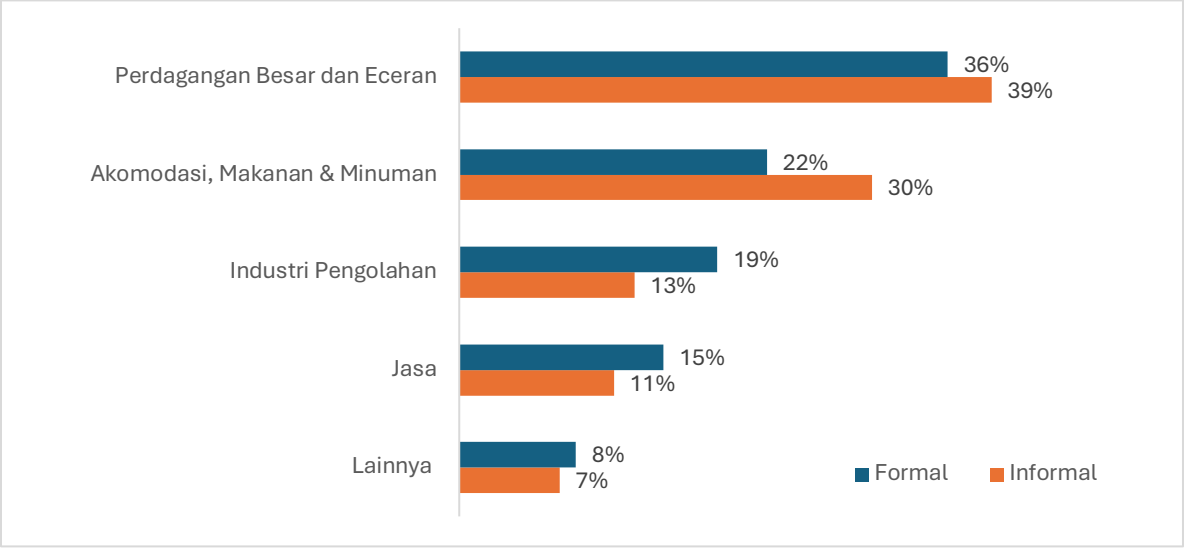

Sumber: INDEF (2026)

3. TEMUAN DAN ANALISIS

Temuan 1: Pengetahuan UMKM terhadap MBG dan KDMP

Survei menunjukkan (Gambar 3.1) bahwa kedua program sudah dikenal sebagian besar UMKM. MBG sudah diketahui oleh 97 persen UMKM dan sudah beroperasi di 92 persen desa/kelurahan responden pada saat periode survei. KDMP sudah diketahui oleh 79 persen UMKM namun dengan keberadaannya yang relatif sedikit dimana hanya 41 persen yang sudah beroperasi, 26 persen sedang dibentuk dan 33 persen belum ada keberadaannya di desa/kelurahan responden. Perlu dicatat, angka keberadaan ini merupakan pengetahuan/persepsi responden yang bisa saja bias atau tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

Gambar 3.1 Pengetahuan UMKM terhadap kedua program (Kiri) dan Keberadaan kedua program berdasarkan lokasi desa/kelurahan responden (Kanan)

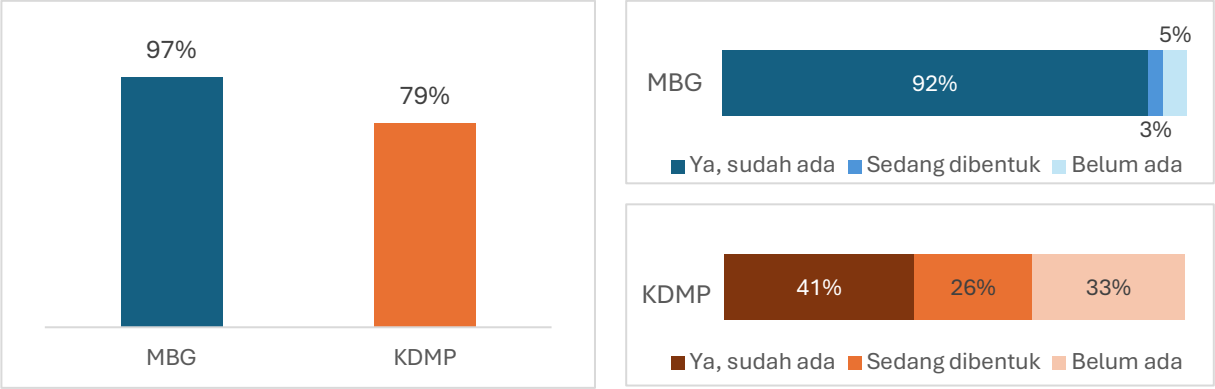

Sumber: INDEF (2026)

Sebagian besar responden sudah mengetahui MBG dan KDMP. Kekurangan yang dihadapi UMKM terletak pada mengakses dan masuk ke ekosistem MBG dan KDMP. Hal ini termasuk informasi operasional, seperti jenis bahan yang dibutuhkan, volume dan harga pembeliannya, serta prosedur untuk menjadi pemasok. Indikasinya terlihat dari 25-27% UMKM yang masih membutuhkan informasi lebih lanjut terkait kedua program tersebut, meskipun telah mengetahui keberadaannya (Gambar 3.6). Pada KDMP, pengetahuan yang mendahului beroperasinya gerai berarti ekspektasi UMKM sudah terbentuk sebelum realisasi. Kondisi ini

membuka kesempatan untuk menetapkan model kemitraan dengan usaha lokal sebelum gerai berjalan, sebelum persepsi persaingan mengeras.

Temuan 2: Corong partisipasi masih terbatas

Pertanyaan selanjutnya setelah mengetahui keberadaan program adalah bagaimana keterlibatan UMKM dalam kedua program? Hasil survei menjawab hanya 5 persen UMKM formal dan 1 persen UMKM informal yang sudah memiliki hubungan (bermitra atau sedang menjajaki kemitraan) dengan MBG. Untuk KDMP, hanya 1 persen UMKM formal yang sudah memiliki hubungan sedangkan semua UMKM informal justru tidak memiliki hubungan sama sekali. Sejalan dengan itu, mayoritas UMKM tidak melihat kedua program dapat membuka peluang baru bagi usaha sama sekali (82 persen untuk MBG, 87 persen untuk KDMP) dimana hanya 2 persen UMKM yang melihat peluang besar/signifikan dari MBG atau KDMP.

Gambar 3.2 Pandangan responden terkait kedua program dapat membuka peluang baru bagi usaha

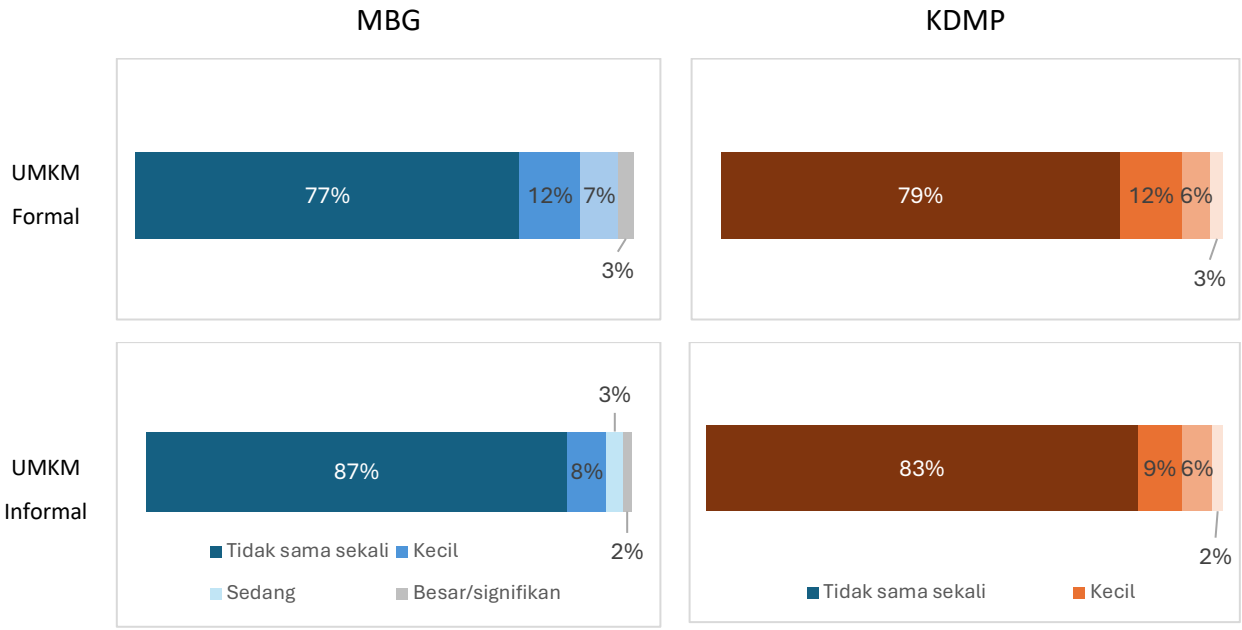

Sumber: INDEF (2026).

Gambar 3.3 Pandangan responden terkait kedua program dianggap pesaing bagi usaha

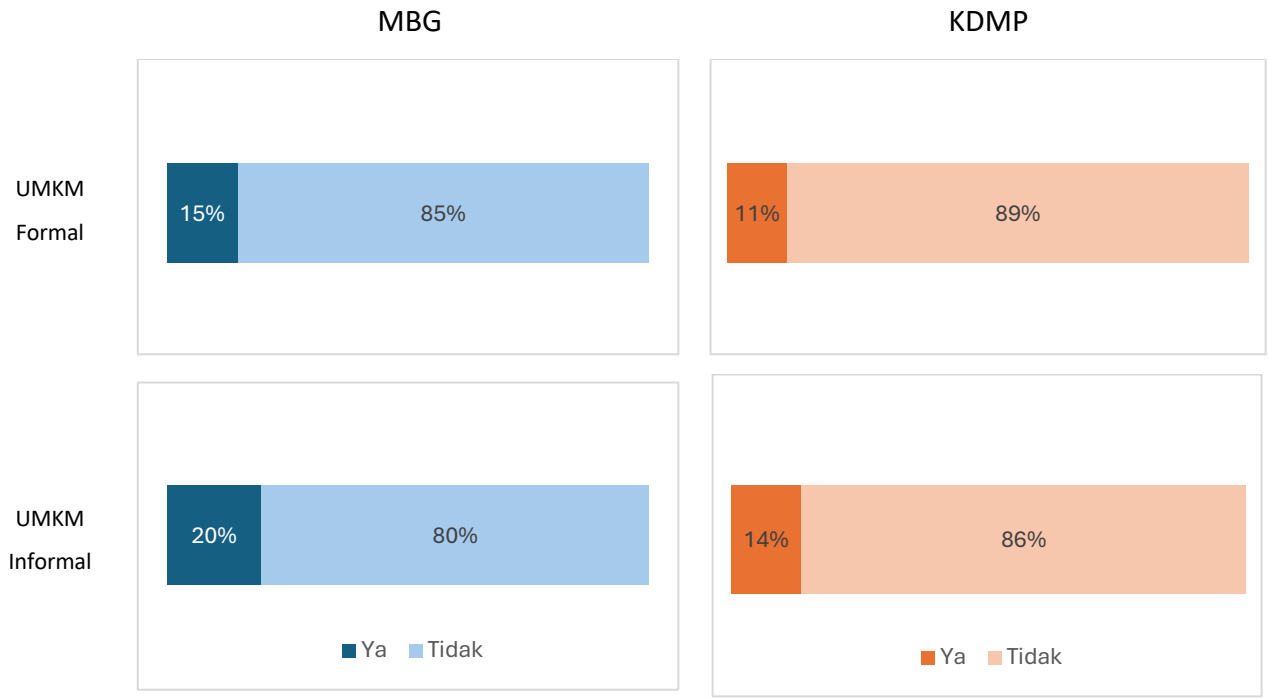

Sumber: INDEF (2026).

Rendahnya keterlibatan pada MBG dapat dijelaskan oleh dua hal. Penjelasan pertama bersifat struktural. Mengingat jumlah SPPG dalam program ini memang terbatas, sekitar 27.500 SPPG (Kementerian Keuangan, 2026) sedangkan terdapat 56,7 juta UMKM (Kementerian UMKM, 2026a); dengan kata lain rasionya sekitar 1:2.000, padahal setiap dapur mungkin hanya membeli dari sejumlah kecil pemasok. Penjelasan kedua berkaitan dengan kapabilitas. Biasanya UMKM, khususnya informal terganjal standarisasi ketika memasok ke perusahaan yang lebih besar. Penjelasan inil yang dapat menjelaskan mengapa jarak formal-informal terjadi. Dengan demikian, kebijakan berikutnya adalah bagaimana membantu sebanyak-banyak UMKM agar dapat memenuhi standarisasi ini sehingga MBG dan KDMP akan memiliki lebih banyak opsi pemasok yang akan menimbulkan kompetisi sehat, meningkatkan kualitas, menurunkan biaya, serta mengoptimalkan pelayanan dan manfaat ke masyarakat luas.

Memastikan perputaran duit negara mengalir ke bawah dalam kedua program ini sangat krusis, mengingat dana yang dipertaruhkan besar. Realisasi anggaran hingga September 2026 setara

rata-rata sekitar Rp600 juta per SPPG per bulan. Studi di Kenya menemukan bahwa dana yang masuk ke ekonomi desa dapat berputar hingga sekitar 2,5 kali jika dikelola dengan baik (Egger et al., 2022). Dengan kata lain tiap SPPG dalam menimbulkan efek pengganda ke ekonomi sekitar hingga Rp1,5 miliar tiap bulannya jika anggaran tersebut melibatkan sebanyak-banyak UMKM yang produktif.

Efek pengganda ini hanya terjadi bila bahan baku dibeli dari produsen lokal. Karena usaha mikro dan petani umumnya tidak mampu memenuhi syarat volume dan kontinuitas secara sendiri-sendiri, lembaga kolektif seperti koperasi, BUMDes, dan KDMP menjadi kunci untuk mengumpulkan pasokan mereka dan menjadi bagian ekosistem MBG. Tanpa lembaga tersebut, pembeli cenderung beralih ke pedagang perantara, sehingga belanja program bocor keluar dari ekonomi lokal. Di sinilah desain dan sinkronisasi kebijakan MBG dan KDMP mesti didorong di masa depan: memastikan keduanya tergabung dalam satu ekosistem utuh.

Pada sisi persaingan (Gambar 3.3), sebanyak 20% UMKM informal memandang MBG sebagai pesaing, dibanding 15% pada UMKM formal. Hal ini mungkin berasal dari kantin dan pedagang di sekitar sekolah yang merasa kehadiran MBG telah menggantikan sebagian makanan yang sebelumnya dibeli siswa. Pada KDMP, persepsi pesaing relatif lebih rendah (11-14%), mungkin karena banyak gerai belum beroperasi. Polanya konsisten dengan kemungkinan efek substitusi: program yang mengalihkan belanja konsumsi ke pemasok terpusat dapat menggeser pendapatan pedagang lokal, kecuali UMKM tersebut diintegrasikan ke dalam rantai pasok program. Literatur pengadaan publik menegaskan bahwa efek penciptaan pasar hanya terjadi bila pemasok kecil benar-benar dilibatkan (Edler & Georghiou, 2007, Aschhoff & Sofka, 2009).

Potensi persaingan dengan warung-warung masyarakat tetap patut diantisipasi, sebab gerai KDMP dapat menawarkan harga lebih murah daripada penjual yang tidak terlalu efisien. Meskipun persaingan antara kedua program ini dengan usaha terdahulu akan menguntungkan konsumen, namun dampak negatif dari persaingan ini seperti bankrutnya UMKM yang tidak

dapat bersaing mesti diantisipasi mengingat sifat UMKM yang biasanya menjadi tempat bergantungnya penghidupan bagi masyarakat kecil dan keluarganya.

Temuan 3: Gap antara Ekspektasi dan Realita

Kombinasi keterlibatan yang rendah dan persaingan yang mulai terasa tercermin pada dampak yang dirasakan UMKM. Namun, penilaian atas dampak yang sudah dirasakan kurang menggembirakan. Mayoritas menyatakan dampak MBG terhadap usahanya stagnan, sebagian bahkan merasakan penurunan (22 persen) daripada peningkatan (5 persen). Pada UMKM informal, 26 persen merasakan dampak menurun dan hanya 2 persen yang merasakan peningkatan. Mayoritas juga menyatakan dampak KDMP terhadap usahanya stagnan, dan lebih banyak yang merasakan penurunan (14 persen) daripada peningkatan (3 persen). Meskipun demikian, sekitar 36-37 persen UMKM berharap akan memperoleh manfaat usaha dari MBG maupun KDMP dalam 12 bulan ke depan. Hal ini menandakan bahwa diperlukannya desain kebijakan agar dapat merangkul sebanyak-banyak UMKM di masa depan ke dalam ekosistem kedua program ini.

Pola dampak ini dapat dijelaskan oleh dua hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penyebab pertama adalah rendahnya keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program. Hanya segelintir UMKM yang menjadi pemasok sehingga sebagian besar tidak ikut menikmati belanja MBG dan KDMP. Penyebab kedua adalah efek substitusi. Bagi UMKM di luar rantai pasok, terutama pedagang di sekitar sekolah, program ini telah mengurangi omset mereka.

Gambar 3.4 Pandangan responden terkait ekspektasi mendapat manfaat dari kedua program (12 bulan ke depan)

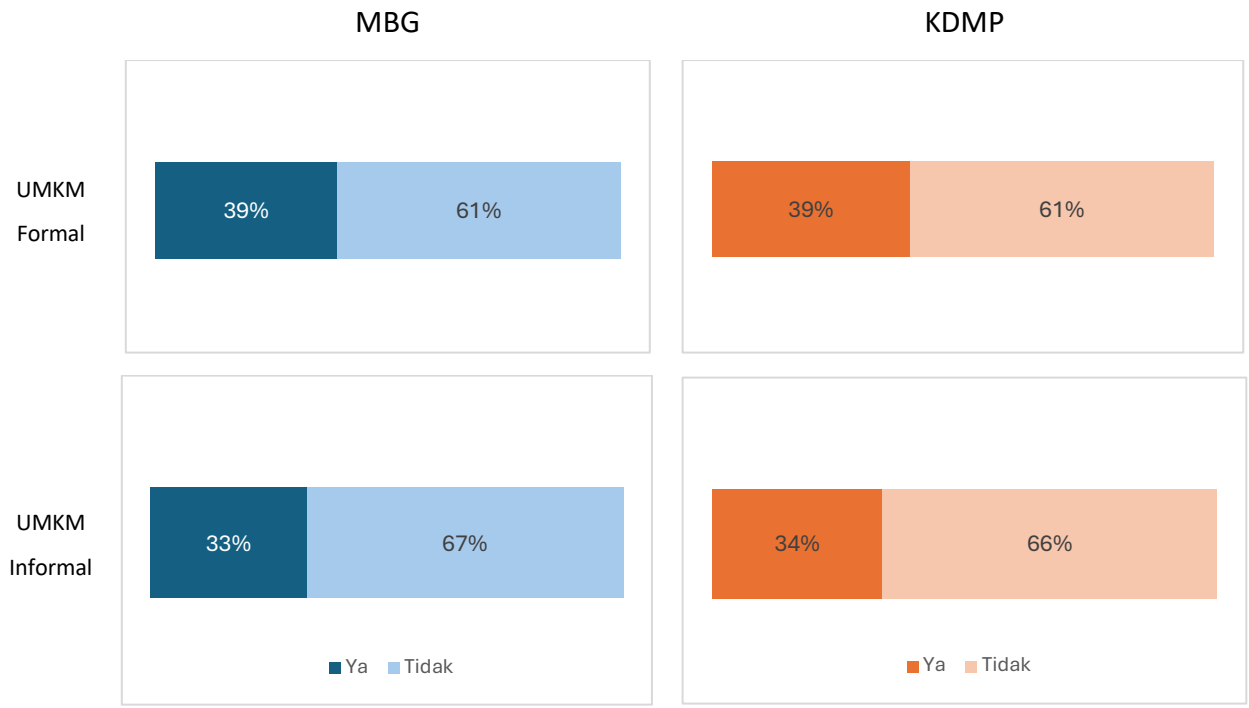

Sumber : INDEF (2026).

Minimnya dampak terhadap UMKM informal ini perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat sekitar 60% pekerja Indonesia berada di sektor ini (BPS, 2026). Kedua program berisiko bersifat regresif bagi UMKM bila manfaat rantai pasok mengalir hanya ke usaha-usaha besar. Risiko ini makin besar karena usaha informal pada dasarnya sudah kecil dan berproduktivitas rendah (Ulyssea, 2020) sehingga tidak dilibatkannya mereka dalam ekosistem MBG dan KDMP akan memperlebar jarak produktivitas mereka dengan usaha formal dan besar. Belum lagi efek lanjutannya, dimana sebagian manfaat bagi rumah tangga miskin pun dapat terus tergerus, khususnya mereka yang kehilangan pendapatan akibat kedua program ini.

Gambar 3.5 Pandangan responden terkait bagaimana keterlibatan dalam kedua program berdampak bagi usaha

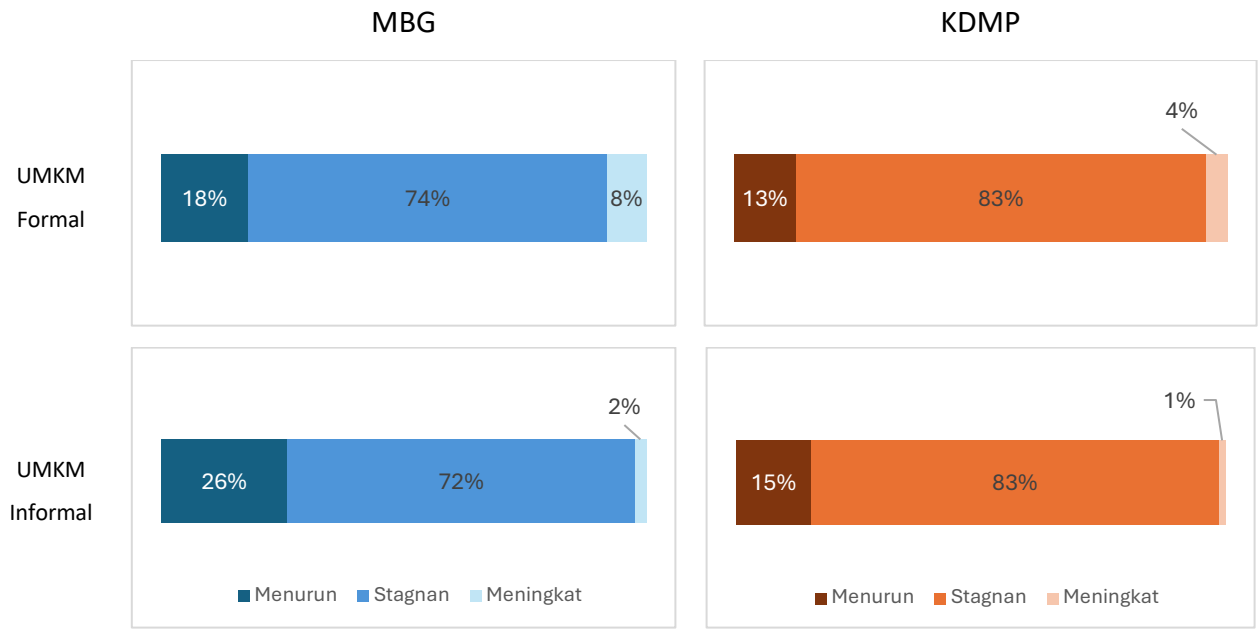

Sumber : INDEF (2026).

Di tengah kondisi usaha yang cenderung menurun, lebih dari sepertiga UMKM masih berharap memperoleh manfaat dalam 12 bulan ke depan (39% UMKM formal dan 34% UMKM informal), jauh di atas proporsi yang sudah merasakan peningkatan (2-8%). Harapan ini merupakan modal awal perbaikan kebijakan ke depan karena menunjukkan masih banyak UMKM yang bersedia terlibat menjadi mitra MBG dan KDMP di masa depan. Pemerintah perlu menjawab harapan ini. Jika tidak, harapan yang tidak terwujud tersebut dapat berubah menjadi kekecewaan yang akan menggerus dukungan para pelaku UMKM dan publik terhadap kedua program unggulan pemerintah ini.

Temuan 4: Dukungan yang dibutuhkan UMKM

Ketika ditanya dukungan apa yang dibutuhkan agar dapat terlibat lebih jauh, UMKM paling banyak menyebut pendampingan usaha, informasi program dan dukungan kredit (Gambar 3.6). Ketiga hal ini dapat jadi fokus dukungan Pemerintah dalam mendukung agar makin banyak

UMKM dapat masuk ke dalam ekosistem MBG dan KDMP. Kepastian kontrak pembelian/kontrak juga disebut oleh 14 persen UMKM formal, sebuah sinyal bahwa sebagian UMKM siap berinvestasi jika memiliki kepastian pembeli/kontrak.

Gambar 3.6 Dukungan yang dibutuhkan UMKM untuk masuk ke ekosistem MBG/KDMP

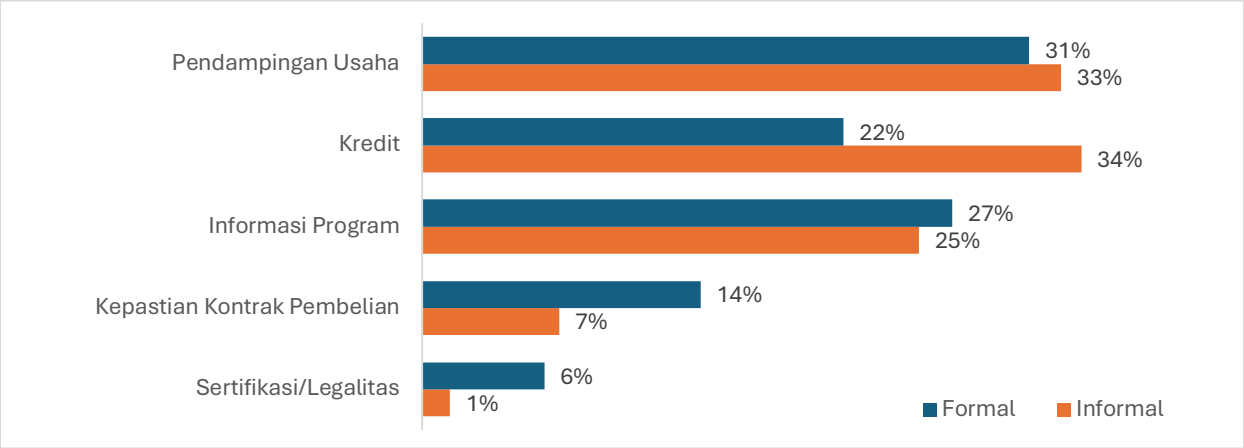

Sumber: INDEF (2026)

Gambar 3.7 menampilkan bahwa mayoritas UMKM tidak yakin MBG dan KDMP akan membuka pasar yang lebih menjanjikan atau memperkuat ekosistem usaha di daerah mereka. Mereka juga melihat bahwa kredit semata juga tidak akan membantu mereka memperoleh proyek dari kedua program: 69 persen kurang atau sangat tidak setuju bahwa kredit membantu memanfaatkan MBG, dan 63 persen untuk KDMP. Hal ini logis mengingat karena biasanya kebutuhan kredit baru akan muncul bila ada pesanan yang perlu dibiayai, dalam konteks ini setelah UMKM mendapatkan proyek/kontrak yang pasti dari MBG dan KDMP.

Gambar 3.7 Pandangan responden terkait ekspektasi manfaat dan dampak dari kedua program

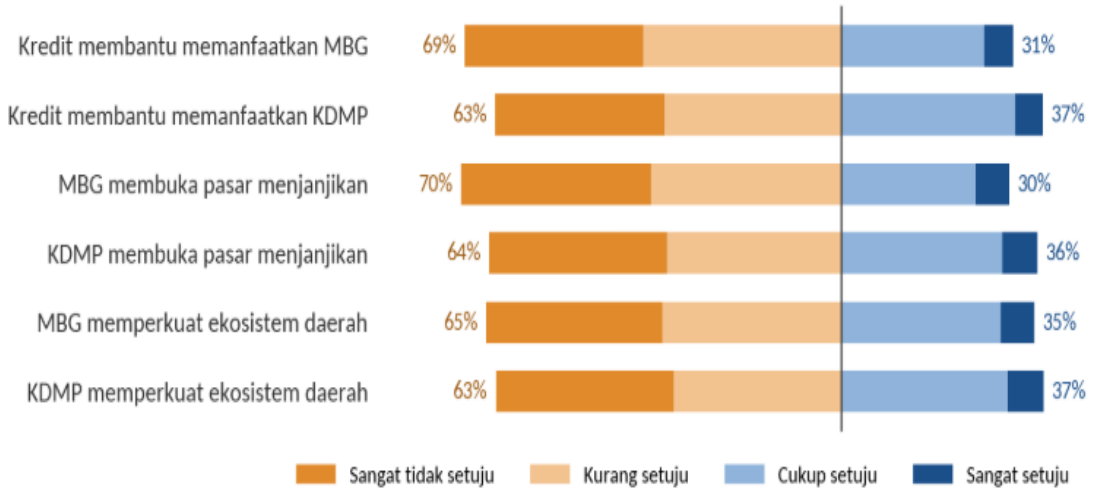

Sumber: INDEF (2026)

Kombinasi temuan ini mengarah pada satu kesimpulan: MBG dan KDMP memiliki potensi besar sebagai *anchor* perekonomian lokal dan *lead buyer* bagi UMKM. Hanya saja, saat ini potensi itu belum terwujud. Kuncinya adalah desain kemitraan yang dapat melibatkan UMKM seluas-luasnya. Informasi terbuka tentang kebutuhan pasokan, kontrak pembelian yang dapat dijadikan dasar pembiayaan, dan pendampingan untuk memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan adalah kunci dalam mengoptimalkan manfaat yang ditimbulkan MBG dan KDMP bagi UMKM, perekonomian lokal, pemerataan ekonomi, dan juga pertumbuhan nasional.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan temuan survei, program MBG dan KDMP masih menghadapi sejumlah tantangan. Partisipasi kedua program oleh UMKM masih rendah (Hanya sekitar 5 persen), meskipun mayoritas UMKM telah mengetahui MBG (97 persen) dan KDMP (79 persen). Selanjutnya, mayoritas UMKM justru menunjukkan pandangan bahwa kedua program belum mampu membawa peluang usaha baru bagi mereka serta memberikan manfaat dan dampak yang minim bagi usaha mereka. Terkait persaingan, meski mayoritas UMKM tidak memandang kedua

program sebagai pesaing, UMKM informal justru memiliki kekhawatiran yang lebih tinggi daripada UMKM formal terkait persaingan usaha melalui efek substitusi dengan MBG dan KDMP. Berangkat dari masukan UMKM terkait dukungan yang dibutuhkan, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam kedua program.

Tabel 4.1 Rekomendasi kebijakan

Rekomendasi	Pelaksana	Indikator	Horizon
1. Buka data kebutuhan pasokan per SPPG/KDMP per kecamatan (jenis, volume, jadwal, harga acuan) melalui SIPGN dan SIMKOPDES	BGN, Kemenkop, Pemda	% SPPG/KDMP yang memublikasikan kebutuhan	0–6 bln
2. Target belanja lokal terukur untuk menahan pengganda di daerah: porsi belanja bahan baku dari UMK dan koperasi lokal, audit larangan pemasok terafiliasi	BGN, Kemenkop	% belanja dari UMK local, jumlah pemasok UMK per SPPG	6–12 bln
3. Kontrak berjangka standar (3–6 bulan) dengan jaminan waktu bayar sebagai dasar pembiayaan berbasis kontrak/invoice	BGN, Agrinas, bank, OJK	Jumlah kontrak, nilai pembiayaan, rata-rata hari bayar	3–12 bln
4. Jalur naik kelas bagi usaha informal: NIB, sertifikasi pangan, pencatatan, dan agregasi melalui koperasi/BUMDes, untuk usaha formal: informasi dan pencocokan bisnis	Kemen UMKM, Kemenkop, Pemda	UMKM informal ber-NIB/bersertifikat, UMKM lolos pencocokan	0–12 bln
5. Mitigasi substitusi: kantin sekolah sebagai mitra SPPG, KDMP sebagai grosir bagi warung, dukungan transisi bagi pedagang terdampak	Pemda, BGN, Kemenkop, Kemendes	Kantin/warung yang menjadi mitra, tren omzet	0–6 bln
6. Survei panel berkala untuk mengevaluasi Peraturan BGN 10/2026 dan operasionalisasi KDMP	lembaga riset	Survei enam bulanan, data pemasok terbuka	Berkala

5. USULAN PENELITIAN BERIKUTNYA

A. Riset Kuartalan: Indeks Persepsi dan Partisipasi UMKM terhadap Program MBG dan KDMP.

Penelitian ini bertujuan memantau perkembangan persepsi, kesiapan, dan keterlibatan UMKM dalam kedua program strategis pemerintah setiap tiga bulan. Indikator utama meliputi tingkat persepsi terhadap program, proporsi UMKM yang telah berpartisipasi, bentuk keterlibatan dalam rantai pasok, persepsi terhadap manfaat ekonomi, serta hambatan partisipasi. Analisis dilakukan dengan membedakan UMKM formal dan informal, sektor usaha, serta wilayah. Hasilnya dapat dikembangkan menjadi Indeks Partisipasi UMKM dalam Program Strategis Pemerintah yang memungkinkan pemerintah mengevaluasi efektivitas implementasi program secara berkala.

B. Riset Tahunan: Evaluasi Dampak Ekonomi MBG dan KDMP terhadap Kinerja UMKM.

Berbeda dengan survei kuartalan yang menitikberatkan pada persepsi dan partisipasi, penelitian tahunan ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana keterlibatan dalam MBG dan KDMP berkaitan dengan perubahan kinerja usaha. Indikator yang dianalisis mencakup pertumbuhan omzet, keuntungan, produktivitas, penyerapan tenaga kerja, investasi, akses pasar, dan kebutuhan pembiayaan. Penelitian dapat menggunakan pendekatan *panel survey* dengan mengikuti responden yang sama dari tahun ke tahun serta membandingkan UMKM yang terlibat dan tidak terlibat dalam program. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar evaluasi apakah MBG dan KDMP benar-benar mampu menciptakan tambahan permintaan, memperkuat rantai pasok lokal, dan meningkatkan kapasitas ekonomi UMKM secara berkelanjutan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Aschhoff, B., & Sofka, W. (2009). Innovation on demand—Can public procurement drive market success of innovations? *Research Policy, 38*(8), 1235–1247. https://doi.org/10.1016/j.respol.2009.06.011

Badan Gizi Nasional. (2026). *Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pelibatan Pelaku Usaha dalam Program MBG*.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026*. BPS.

CNN Indonesia. (2026). *Dampak nyata MBG di 2 tahun era Prabowo*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261007150154-20-1412694/dampak-nyata-mbg-di-2-tahun-era-prabowo

Edler, J., & Georghiou, L. (2007). Public procurement and innovation—Resurrecting the demand side. *Research Policy, 36*(7), 949–963. https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.03.003

Egger, D., Haushofer, J., Miguel, E., Niehaus, P., & Walker, M. (2022). General equilibrium effects of cash transfers: Experimental evidence from Kenya. *Econometrica, 90*(6), 2603–2643. https://doi.org/10.3982/ECTA17945

Kementerian Keuangan. (2026, 9 Oktober). *Konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2026*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Koperasi. (2026, 17 Oktober). *Dashboard pemetaan lahan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. https://simkopdes.go.id/pers/asset

Kementerian UMKM. (2026a). KOMPILASI STATISTIK POPULASI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DAN KEWIRAUSAHAAN INDONESIA TAHUN 2024 – 2025. Data UMKM. https://umkm.go.id/publikasi. https://175utx.umkm.go.id/uploads/KOMPILASI_STATISTIK_POPULASI_USAHA_MIKRO_KECIL_DAN_MENENGAH_DAN_KEWIRAUSAHAAN_INDONESIA_TAHUN_2024_2025_d72f75c2ab.pdf

Kementerian UMKM. (2026b). UMKM dalam Angka: Pilar Utama Ekonomi Nasional 2020–2024. Data UMKM. https://umkm.go.id/publikasi. https://175utx.umkm.go.id/uploads/Infografis_UMKM_Dalam_Angka_665d526195.png

Kementerian UMKM. (2026c). *KemenUMKM perkuat integrasi kebijakan lewat diseminasi ASPI*. https://umkm.go.id/news/uux7ug7s3insuqaqzx69jcsq

Ulyssea, G. (2020). Informality: Causes and consequences for development. *Annual Review of Economics, 12*, 525–546. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-082119-121914